

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**TAHUN
2024**





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang akuntabel (*good governance*) untuk mewujudkan pembangunan suatu daerah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dan terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (*accountable*) serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instruksi Presiden Republik Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian, Instruksi Presiden ini diganti dengan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi organisasi.

a. Kedudukan Dinas dan Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Flores Timur di sektor perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di sektor perikanan.
2. Pelaksanaan pembinaan operasional di sektor perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Pengendalian dan pengawasan teknis di sektor perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis di sektor perikanan.
5. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum di sektor perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

C. STRUKTUR ORGSANISASI

a. Kedudukan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Flores Timur di sektor perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di sektor perikanan.
2. Pelaksanaan pembinaan operasional di sektor perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Pengendalian dan pengawasan teknis di sektor perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis di sektor perikanan.
5. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum di sektor perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 33 orang sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|------------|
| ➤ PNS | : 21 orang |
| ➤ P3K | : 12 orang |
| ➤ Tenaga Kontrak (Teko) | : 5 orang |

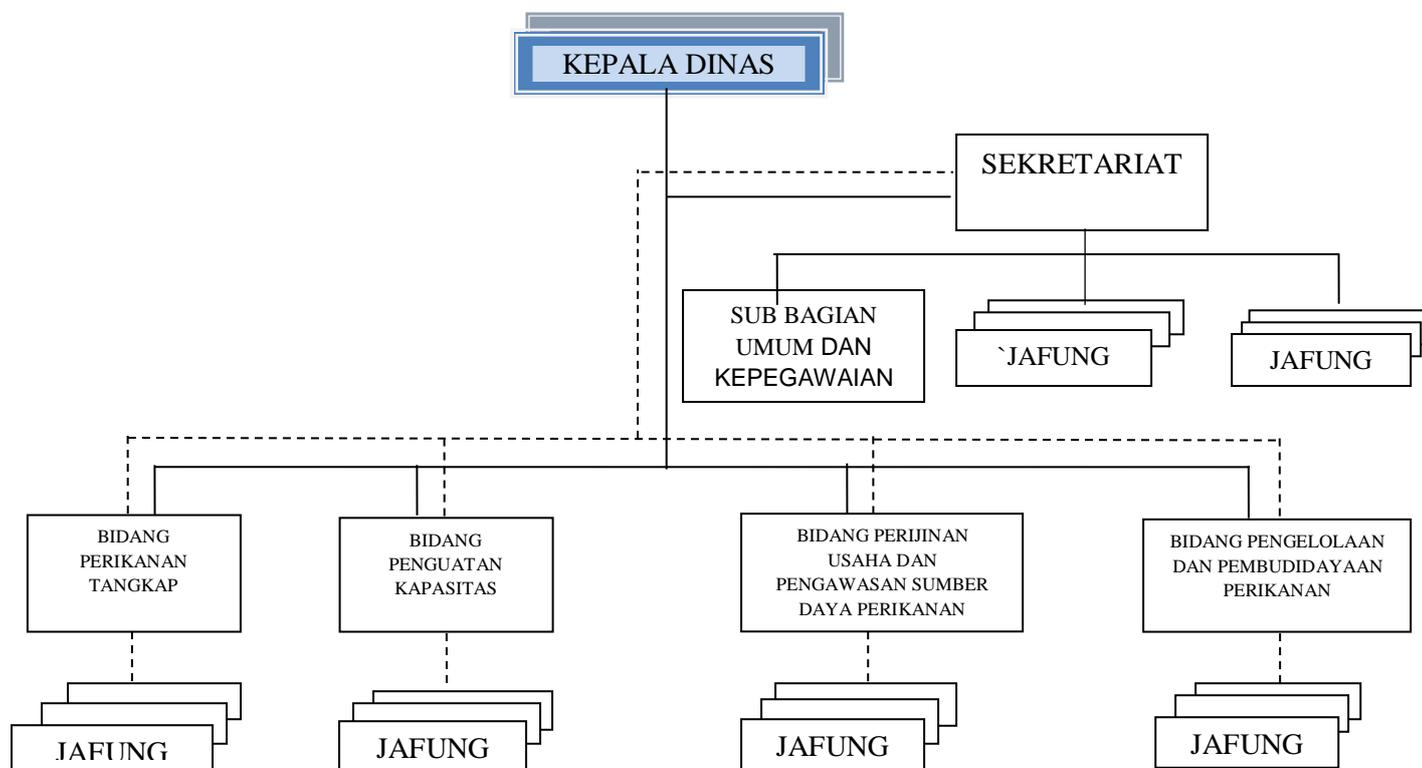
1. Menurut Golongan:
 - Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan II : 1 orang
 2. Menurut Eselonering:
 - Eselon II.a : 1 orang
 - Eselon III.a : - orang
 - Eselon III.b : 3 orang
 - Eselon IV.a : - orang
 - Fungsional Penyetaraan Jabatan : 8 orang
 - Fungsional umum : 8 orang
 - Tugas Belajar : 2 orang
 - ASN P3K : 12 orang
 3. Menurut Jenis Kelamin:
 - Laki-laki : 22 orang
 - Perempuan : 11 orang
 4. Menurut Tingkat Pendidikan:
 - Magister/S2 : 1 orang
 - Sarjana/S1 : 13 orang
 - D III : 5 orang
 - SLTA : 5 orang
 - SLTP : 1 orang
- d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 dan Perda Kabupaten Flores Timur nomor 76 tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan Tangkap
- d. Bidang Penguatan Kapasitas
- e. Bidang Perizinan Usaha dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- f. Bidang Pengolahan dan Pembudidayaan Perikanan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KAB. FLORES TIMUR



D. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Uraian tugas pokok dan fungsi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas :

1. Perumusan kebijakan bidang perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perikanan
3. Pelaksanaan administrasi dinas
4. Pembinaan, pengordinasian dan pengendalian urusan perikanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris :

1. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
 2. Penyusunan program dan anggaran
 3. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah
 4. Pengelolaan Urusan kepegawian
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perikanan Tangkap :
 1. Penyusunan rencana kerja perikanan tangkap
 2. Perumusan kebijakan teknis perikanan tangkap
 3. Pelaksanaan program dan kegiatan perikanan tangkap
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Penguatan Kapasitas :
 1. Penyusunan rencana kerja penguatan kapasitas
 2. Perumusan kebijakan dan kegiatan penguatan kapasitas
 3. Pelaksanaan program dan kegiatan penguatan kapasitas
 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penguatan kapasitas
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perijinan Usaha dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 1. Penyusunan rencana kerja perizinan usaha dan pengawasan sumber daya perikanan
 2. Perumusan kebijakan teknis perizinan usaha dan pengawasan sumber daya perikanan
 3. Pelaksanaan program dan kegiatan perizinan usaha dan pengawasan sumber daya perikanan
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
6. Bidang Pengolahan dan Pembudidayaan Perikanan
 1. Penyusunan rencana kerja pengolahan dan pembudidayaan perikanan
 2. Perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pembudidayaan perikanan
 3. Pelaksanaan program kegiatan pengolahan dan pembudidayaan perikanan
 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pembudidayaan perikanan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawian
 1. Penatausahaan administrasi perkantoran
 2. Pengelolaan dokumen kepegawian
 3. Pengelolaan perlengkapan perkantoran
 4. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

E. TUJUAN DAN MANFAAT:

A. Tujuan:

- a. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program / kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sesuai perencanaan strategis dalam bentuk laporan.

B. Manfaat:

Sesuai Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Mendorong Dinas Perikanan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Menjadikan Dinas Perikanan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
- c. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perikanan.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perikanan.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Di dalam Perjanjian Kinerja terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang dievaluasi di dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

G. SARANA PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

SARANA DAN PRASARANADINAS PERIKANAN KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024
Tabel 1.1

No.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Gedung Kantor	1	UNIT	BAIK
2	Sepeda Motor	17	UNIT	BAIK
3	Mobil; Dinas Operasional	3	UNIT	BAIK
4	Meja ½ Biro	19	Unit	Baik
5	Lemari Kayu	6	Buah	Baik
6	Kuris kerja pejabat lainnya	1	Buah	Baik
7	Mesin kompresor	1	Buah	Baik
8	Peralatan las Listrik	1	Buah	Baik
9	Perkakas khusus (special tools) lainnya dst.	1	Buah	Baik
10	Bor	1	Buah	Baik
11	Meja rapat	4	Buah	Baik
12	Bak cuci	1	Buah	Baik
13	Alat pemadam kebakaran lainnya	3	Buah	Baik
14	Kursi kerja pejabat Eseleon III	3	Buah	Baik
15	Kursi kerja pejabat Eseleon IV		Buah	Baik
16	Genset	1	Buah	Baik
17	Sepeda Motor	17	Buah	Baik
18	Lemari Kaca/Etalase	4	Paket	Baik
19	Cold Room Frezer	1	Buah	Baik
20	Pick Up	1	Buah	Baik
21	Laptop	8	Buah	Baik
22	Kendaraan Motor angkutan barang lainnya	1	Paket	Baik
23	Alat ukur Lain – Lainnya	1	Buah	Baik
24	Meja kerja kayu	1	Buah	Baik

No.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
25	Kursi tamu	2	Baik	Baik
26	Kursi Putar	5	Buah	Baik
27	AC Split	6	Buah	Baik
28	Cool Box	1	Buah	Baik
29	Alat pendingin lainnya	1	Buah	Baik
30	Kray/Gordyn	45	Buah	Baik
31	Kapal patroli laut	2	Buah	Rusak ringan
32	Buffet kaca	1	Buah	Baik
33	Note book	3	Buah	Rusak Berat
34	Kursi kayu	5	Buah	Baik
35	Mesin pemotong rumput	1	Buah	Baik
36	Lemari Es	1	Buah	Baik
37	A.C Window	1	Buah	Baik
38	Camera Video	1	Buah	Baik
39	Rak besi	2	Buah	Baik
40	Hand Metal Detector	1	Buah	Baik
41	Pelat stainless stell (304)	14	Buah	Baik
42	Gravity Roller Stainless	3	Buah	Baik
43	Pisau stainless untuk lairing	28	Buah	Baik
44	Asahan pisau bentuk bulat	19	Buah	Baik
45	Asahan pisau bentuk oval	8	Buah	Baik
46	Timbangan digital (1,5 kg)	2	Buah	Baik
47	Timbangan digital (6 kg)	2	Buah	Baik
48	Timbangan digital (30 kg)	2	Buah	Baik
49	Timbangan duduk digital besar (150 kg)	3	Buah	Baik
50	Troli barang	2	Buah	Baik
51	Hend driyer	4	Buah	Baik
52	High pressure washer	1	Buah	Baik
53	Insect kiler lamps	3	Buah	Baik
54	Vacuum sealer	1	Buah	Baik
55	Strapingg Band machine	1	Buah	Baik
56	Pan ABF	349	Buah	Baik
57	Troli Es	1	Buah	Baik
58	Meja tambahan	13	Buah	Baik
59	Kursi rapat	8	Buah	Baik
60	Rak sepatu (aluminium)	4	Buah	Baik

No.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
61	Pakaian kerja pengolahan	50	Buah	Baik
62	Pakaian kerja Cold Strage	4	Buah	Baik
63	Cool box untuk tuna	7	Buah	Baik
64	Televisi	1	Buah	Rusak
65	Locer Ruang ganti karyawan	3	Buah	Baik
66	Gantung baju stenles	3	Buah	Baik
67	Living room	1	Buah	Baik
68	P.C Unit	5	Buah	Rusak
69	Printer (peralatan personel computer)	5	Buah	Baik

H. SUMBER PENDANAAN

Pada Tahun 2024, Dinas Perikanan mendapat Alokasi Dana dari APBD Kabupaten Flores Timur sebesar sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Sumber Pendanaan dan Realisasi Anggaran

Tabel. 1.2

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran*	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih/bertambah (Rp)
		(Rp)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Belanja Tidak Langsung	2.651.764.362	2.467.207.565	184.556.706
1	Belanja Pegawai	2.651.764.362	2.467.207.565	184.556.706
B	Belanja Langsung	8.982.242.190	8.280.057.300	702.184.899
1	Belanja Barang dan Jasa	7.841.290.710	7.420.253.395	421.037.324
2	Belanja Modal	1.140.951.480	859.803.905	281.147.575
	Jumlah Belanja	11.634.006.552	10.747.264.865	886.741.605

I. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2024 diantaranya yaitu :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

J. SISTEMATIKA LAPORAN

Dengan mempedomani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Struktur Organisasi
- D. Tugas Dan Fungsi
- E. Tujuan dan Manfaat
- F. Sistematika Penyajian
- G. Sarana Prasarana
- H. Sumber Pendanaan
- I. Isu Strategis
- J. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

D. Strategi Pemecahan Masalah

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran



A. PERENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi

Implementasi pembangunan perikanan, mengacu pada pertimbangan aspek kebijaksanaan pembangunan kabupaten lima tahun ke depan, potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki, kendala dan permasalahan serta lingkungan strategis. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan melihat potensi sumber daya perikanan yang merupakan potensi unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan yang dapat mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Flores Timur, terutama masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan maka ditetapkan visi pembangunan perikanan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut : “ ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT NELAYAN FLORES TIMUR YANG SEJAHTERA***”.

2. Pernyataan Misi

Sedangkan misi Dinas Perikanan adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kecerdasan SDM aparatur dan kelompok usaha perikanan.

- c. Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya perikanan.
- d. Meningkatkan peran sektor perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Penjelasan makna misi:

1. Misi pertama :

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya dilakukan peningkatan sarana dan prasarana tangkap bagi nelayan tradisional dan kelompok usaha perikanan lainnya.

2. Misi kedua

Dengan memanfaatkan peranan lembaga penelitian yang ada diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kelompok usaha kelautan dan perikanan.

3. Misi ketiga

Untuk menekan kegiatan *iillegal fishing* perlu dikembangkan sistem pengawasan terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya ikan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.

4. Misi keempat

Dengan mengoptimalkan teknologi dan SDM yang tersedia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah di sektor perikanan.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Pengidentifikasian faktor – faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor – faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor – faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain :

- a. Peningkatan produksi nelayan tradisional dan kelompok usaha perikanan lainnya.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dengan menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dengan menurunnya praktek illegal fishing dan penangkapan yang bersifat deskrutif
- c. Adanya peningkatan perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan ekonomi dan SDM.
- d. Peningkatan pendapatan asli daerah di bidang perikanan.

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tujuan pembangunan perikanan adalah :

- a. Meningkatkan produksi nelayan tradisional dan kelompok usaha perikanan lainnya
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kualitas sumberdaya pelaku usaha perikanan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan dan populasi sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan perikanan adalah:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana tangkap, budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
- b. Penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan.
- c. Meningkatnya mutu produk olahan kelompok usaha yang berdaya saing.
- d. Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- e. Meningkatnya peran masyarakat dan sektor terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- f. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB daerah.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

Tabel 2.1 :

Visi : Terwujudnya masyarakat nelayan Flores Timur yang sejahtera	
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.	
Tujuan	Sasaran

1. Meningkatkan produksi nelayan tradisional dan kelompok usaha perikanan lainnya.	1. Meningkatnya sarana dan prasarana tangkap, budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Misi 2 : Meningkatkan kemampuan dan kecerdasan SDM aparatur dan kelompok usaha perikanan.	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kualitas sumberdaya pelaku usaha perikanan	1. Penguatan kelembagan kelompok usaha perikanan 2. Meningkatnya mutu produk olahan kelompok usaha yang berdaya saing.
Misi 3 : Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya perikanan.	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas lingkungan dan populasi sumberdaya perikanan secara berkelanjutan	1. Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya perikanan. 2. Meningkatnya peran masyarakat dan sektor terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
Misi 4 : Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah.	1. Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB daerah.

Tabel 2.2 Matriks hubungan antara tujuan dan sasaran:

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatkan produksi nelayan tradisional dan	Prosentasi produksi nelayan dan kelompok usaha perikanan	Meningkatnya sarana dan prasarana tangkap, budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran	- Jumlah sarana dan prasarana perikanan

kelompok usaha perikanan lainnya		dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan	tangkap dan budidaya - Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya - Jumlah produksi usaha perikanan
	Prosentase kelompok usaha perikanan	Penguatan kelompok usaha perikanan	Jumlah kelompok usaha perikanan
	Prosentase kualitas produk olahan	Meningkatnya mutu produk olahan kelompok usaha yang berdaya saing	Kualitas produk olahan
Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kualitas sumber daya pelaku usaha perikanan	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan sumber daya manusia	Penguatan kelompok usaha perikanan	Peningkatan kualitas kelompok usaha perikanan
Meningkatkan kualitas lingkungan dan populasi sumber daya perikanan secara berkelanjutan	Prosentase penurunan tingkat kerusakan biota laut	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya perikanan	Penurunan praktek <i>illegal fishing</i> dan perusakan biota laut
Meningkatkan kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian daerah	Prosentase peningkatan PAD	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam pertumbuhan PDRB daerah	Peningkatan PAD di bidang perikanan.

5. Penetapan Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2024 tersebut, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

- Penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolahan hasil perikanan dan penyuluh;
- Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan
- Membuat standar pelayanan perizinan dan standar operasional prosedur;
- Penyediaan sarana dan prasarana perikanan
- Pengolahan hasil (pasca panen Perikanan)
- Peningkatan kualitas produksi
- Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

6.

7. Program dan Kegiatan

Dari visi-misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran melalui rencana program dan kegiatan tahun 2024. Kebijakan-kebijakan dan program-program dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan, dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur

Tabel.2.3

Program / Kegiatan		Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		

Program / Kegiatan		Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.999.255	59.099.255
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	14.999.610	19.099.610
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasipenyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	9.999.950	14.999.950
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	9.999.995	9.999.995
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	14.999.700	14.999.700
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.357.991.617	2.622.036.402
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	2.285.091.877	2.536.664.362
	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi tugas pelaksanaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.900.000	57.900.000

Program / Kegiatan		Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	14.999.940	27.472.040
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		19.999.860	19.999.860
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.999.880	9.999.880
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.980	9.999.980
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9.999.972	9.999.972
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.999.860	4.999.860
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.999.860	4.999.860
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		99.713.848	227.796.270

Program / Kegiatan		Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4.999.336	4.999.336
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)	4.546.500	8.469.750
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14.745.935	24.999.972
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4.998.357	7.502.372
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9.603.720	23.499.840
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Pertaturan Perundang – Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	900.000	900.0000
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10.000.000	7.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	49.920.000	142.325.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.999.960	96.758.860

Program / Kegiatan		Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14.999.960	96.758.860
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah		191.190.760	183.669.760
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	999.760	999.760
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	65.991.000	103.320.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	124.200.000	79.350.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.340.960	44.290.960
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Bahan Bakar, Pelumas dan Suku Cadang Kendaraan Bermotor	14.999.000	57.417.500
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Meubel		3.500.000	3.500.000

Program / Kegiatan		Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	2.500.000	5.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	3.360.000	13.985.472
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	9.999.672	9.999.672
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1.950.000	1.950.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		2.502.576.530	5.520.975.190
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		2.502.576.530	5.520.975.190
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	19.999.950	19.999.650

Program / Kegiatan		Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia (unit)	2.482.576.580	5.500.975.540
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.189.999.103	1.212.564.532
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	49.999.780	49.938.174
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	49.999.880	49.999.780
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1.139.999.323	1.162.626.358
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		1.099.999.423	1.122.626.498
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu daerah Kab/Kota		39.999.900	39.999.860
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		79.999.750	128.891.080

Program / Kegiatan	Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawah dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota		79.999.750	128.891.080
Sub Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	79.999.750	128.891.080
V PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.109.087.330	1.438.701.650
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		59.888.010	96.938.010
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen) Terlaksananya	59.888.010	96.938.010
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota		1.049.199.320	1.341.763.640

Program / Kegiatan	Sasaran Indikator	Pagu (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	1.049.199.320	1.341.763.640
Total		7.809.802.343	11.679.306.561

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam Penyusunan penetapan Kinerja Instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), seperti tercantum pada lampiran laporan.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2024 SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	1	3	4	5	6	7
				<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	518.101.277	
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	49.999.255	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	14.999.610	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Lapoeran Capaian Kinerja dan Intisarsi Realisasi Kinerja SKPD	9.999.995	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.999.950	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.700	
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	72.899.940	
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	Kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	57.900.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	14.999.940	
				<i>Adminitrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah</i>	29.999.832	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	9.999.880	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Rekonlisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.980	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	1	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya dan Terselenggaranya pelayanan Birokrasi Melalui Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.972	
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	14.999.480	
		Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi Pegawai	12 dokumen	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.999.860	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.999.620	
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	104.713.718	
		Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4.999.336	
		Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.546.500	
		Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.998.357	
		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.745.935	
		jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.603.720	
		-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	
		Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.920.000	
		-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.999.870	
	jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	3.000.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	1	3	4	5	6	7
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	17.999.620	
		Jumlah paket Pengadaan Meubel yang disediakan	3 unit	Pengadaan Meubel	2.999.640	
		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.999.980	
				<i>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	191.190.760	
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	999.760	
		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.991.000	
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	124.200.000	
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	36.298.672	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.989.000	
		Jumlah mebel yang dipelihara	8 unit	Pemeliharaan mebel	3.500.000	
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 unit	Pemeliharaan peralatan dan mesinnya lainnya	2.500.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.360.000	
		Jumlah Sarana prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.999.672	
		Jumlah Sarana prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.950.000	
				<i>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</i>	2.627.523.106	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	1	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Produksi Perikanan			<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.502.576.230	
		Jumlah Data dan Informasi Sumber daya Ikan dan Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	19.999.650	
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1173 unit	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.482.576.580	
				<i>Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	124.946.876	
		Jumlah SOP dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 dokumen	Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan (TPI)	124.946.876	
3				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.189.999.203	
				<i>Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan kecil</i>	1.189.999.203	
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	246 kelompok	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan kecil	49.999.880	
		jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	246 kelompok	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalm 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1.099.999.423	
		Jumlah hasil ikan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	1 dokumen	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	39.999.900	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	1	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	79.999.750	
				<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten Kota</i>	79.999.750	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten Kota	1 Dokumen	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai dan Danau, waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten Kota	79.999.750	
5	Meningkatnya produksi pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikan			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.109.087.330	
				<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Bagi Usaha Skala Mikro dan kecil</i>	59.888.010	
		Jumlah Data dan Informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu (Satu) Daerah Kabupaten Kota	59.888.010	
				<i>Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</i>	1.049.199.320	
		Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota yang terfasilitasi	95 pelaku Usaha	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1.049.199.320	
	JUMLAH				5.524.710.666	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2024.

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pencapaian kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan atau kendala dan permasalahannya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang dijabarkan di dalam program / kegiatan tahun 2024 yang tertuang di dalam komitmen / perjanjian kinerja antara Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dengan Bupati Flores Timur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah 6 sasaran pembangunan perikanan yang tercantum di dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024 yaitu :

1. Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi perikanan
3. Menguatnya kelembagaan kelompok usaha perikanan
4. Meningkatnya diversifikasi dan mutu produk olahan kelompok usaha
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan

Untuk mencapai sasaran di atas, dalam tahun anggaran 2024 Dinas Perikanan mendapat alokasi anggaran dari APBD II sebesar **Rp.11.634.006.552** (*Sebelas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri dari:

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 7.841.290.710,-
- Belanja Pegawai : Rp. 2.651.764.362,-
- Belanja Modal : Rp. 1.140.951.480,-

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pencapaian kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan atau kendala dan permasalahannya.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin buruk.

Rumus yang digunakan:

Capaian Indikator yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan menurut skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 - 100 : Sangat baik
- 75 - 84 : Baik
- 55 - 74 : Cukup baik
- 0 - 54 : Kurang baik

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.1

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan	Peningkatan PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan	1,75%	5,83%	100%

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel. 3.2

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		2024		
			2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan	Peningkatan PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan	%	2,91%	1,75%	5,83%	100%

3. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada Tabel 3.2 di atas, terbaca perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Untuk hasil capaian masing-masing sasaran strategis, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk sasaran strategis di Dinas Perikanan hanya memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang mana indikator kinerja mengalami peningkatan PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan pada tahun 2024 ini mencapai realisasi 5,83 % dari Target 1,75 %
- b. Untuk sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan, untuk produksi perikanan tangkap, mencapai 93,02%; sedangkan untuk produksi perikanan budidaya, masi dibawah sekali dengan capaian 20,25% Salah satu hal yang mempengaruhi capaian ini adalah dukungan ketersediaan sarana prasarana budidaya untuk tahun sebelumnya kurang, adanya serangan penyakit ice-ice

dan keputihan pucuk yang menyebabkan gagal panen, yang berdampak pada kesulitan kelompok untuk mendapatkan lagi bibit untuk penanaman kembali dan juga kondisi cuaca yang ekstrim, yang mengakibatkan kerusakan sarana prasarana budidaya (bahkan hanyut) terbawa arus dan gelombang laut.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah revitalisasi sarana prasarana budidaya agar dapat menaikan angka produksi perikanan budidaya.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebagai berikut ini :

Analisis Realisasi anggaran

Tabel.3.3

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran*	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih/bertambah (Rp)
		(Rp)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	600.000.000	433.038.790	166.961.210
A	Belanja Tidak Langsung	2.651.764.362	2.467.207.656	184.556.706
1	Belanja Pegawai	2.651.764.362	2.467.207.656	184.556.706
B	Belanja Langsung	8.982.242.199	8.280.057.300	702.184.899
1	Belanja Barang dan Jasa	7.841.290.719	7.420.253.395	421.037.324
2	Belanja Modal	1.140.951.480	859.803.905	281.147.575
	Jumlah Belanja	11.634.006.561	10.747.264.956	886.741.625

*) Alokasi anggaran setelah perubahan

Alokasi anggaran belanja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024. Setelah perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, Dinas Perikanan mendapat alokasi anggaran belanja yaitu sebesar **Rp. 11.634.006.561**

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada hakikatnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan yang diharapkan, sedangkan pemecahan masalah atau penyelesaian masalah adalah proses pencarian jalan keluar bagi masalah tersebut. Seperti yang telah dikemukakan di bab satu, Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memiliki beberapa permasalahan dalam menyelenggarakan urusan Perikanan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dalam penerbitan perizinan;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Berbagai cara telah diupayakan oleh Dinas Perikanan misalnya saja mengusulkan sejumlah anggaran untuk mengakomodir kebutuhan Dinas, seperti sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan kantor serta pendidikan dan pelatihan pegawai. Pada tahun 2024 kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya beberapa peralatan dan perlengkapan kantor, itu pun belum seluruh perangkat komputer yang dapat disediakan, dengan harapan bila dapat terpenuhi kelak dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur.

Pada tahun 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 10.747.264.956,- atau 92,38% dari total Rp. 11.634.006.561-**

Keberhasilan Pencapaian Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perencanaan jumlah anggaran yang memadai dengan rencana tingkat output yang diinginkan.
- Tersedianya SDM pelaksana yang mempunyai kemampuan baik secara administratif maupun teknis.

Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah:

- Beberapa pelaku usaha perikanan yang tidak aktif melaksanakan usahanya
- Minimnya pengetahuan masyarakat nelayan terhadap dampak negatif akibat penangkapan ikan secara *destructive fishing* dan *illegal fishing*.
- Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan APBD.
- Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur maupun Nelayan (penangkapan dan paska penangkapan) serta kegiatan-kegiatan yang mendukung meningkatnya PAD.

Larantuka, Februari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

MOH. IKRAM, S.Pi

PEMBINA TK.I

NIP. 197302121999031010

